



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat pSPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;

b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB.

## Bagian Kedua

### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh pekon, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atas Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:



1. jual beli;
  2. tukar-menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

### Paragraf 3

#### PBJT

#### Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;

- f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pertunjukan kesenian, musik dan tari dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.



- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4

#### Pajak Reklame

#### Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan / *billboard*/*videotron*/*megatron*;

- b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### PAT

#### Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

#### Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6

#### Pajak MBLB

#### Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan



mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
  - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Opsen PKB

#### Pasal 42

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 43

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### Pasal 45

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen). dihitung dari besaran Pajak terutang

#### Pasal 46

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 8  
Opsen BBNKB

Pasal 47

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 52

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur serapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 53

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah dan limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



### Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

### Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;dan

- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 63

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 68

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha;
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

### Pasal 73

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan gedung;
    3. perubahan luas Bangunan gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.



- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 74

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

#### Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi;
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) atau Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteran;

- d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
  - l. Pembayaran dan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi.
  - m. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasasi belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemungutan Pajak

### Pasal 80

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

#### Pasal 81

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 83

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari Pajak terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 100.000 dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau

### Bagian Ketiga

#### Pemungutan Retribusi

### Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.



- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
  - (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 86

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 90

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 92

Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 94

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (9), Pasal 62 ayat (10) dan Pasal 72 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.



#### Pasal 95

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 95 merupakan pendapatan negara.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 98

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 57);
2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 58);
3. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 80);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 106);
25. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136);
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 146);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 76);

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 77);
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);
30. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 85);
31. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 197);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 198);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 100);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 101

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 220

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01/1477/TGS/2024

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.



Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten

tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik

roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00.

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00. = Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{a. BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$$

$$\text{b. Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00. = \text{Rp}15.840.000,00.$$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD A menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut



1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi  
Pada tahun 2027, RSUD A memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 55

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Tanggamus menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten TANGGAMUS memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut,

Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar,

sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 106

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang

a. Tarif Rawat Jalan pada RSUD Batin Mangunang

| NO | JENIS PELAYANAN              | JUMLAH |
|----|------------------------------|--------|
|    |                              | (Rp)   |
| 1  | 2                            | 3      |
| 1  | Pemeriksaan Dokter Umum      | 35,000 |
| 2  | Pemeriksaan Dokter Spesialis | 50,000 |
| 3  | Pemeriksaan Perawat Poli     | 10,000 |

b. Tarif Rawat Inap pada RSUD Batin Mangunang

| NO  | JENIS PELAYANAN         | JUMLAH  |
|---|-------------------------|---------|
|   |                         | (Rp)    |
| 1   | 2                       | 3       |
| 1   | Kelas III               | 130,000 |
| 2   | Kelas II                | 160,000 |
| 3   | Kelas I                 | 180,000 |
| 4   | Kelas Utama/VIP         | 200,000 |
| 5   | Isolasi/Rehabilitasi    | 250,000 |
| 6   | ICU                     | 350,000 |
|   |                         |         |
| NO  | JENIS PELAYANAN         | JUMLAH  |
|   |                         | (Rp)    |
| Rawat Inap Neonatus                           |                         |         |
| 7   | Ruang Neonatus          | 150,000 |
| 8   | Incubator bayi          | 250,000 |
| 9   | CPAP bayi               | 350,000 |
| 10  | Isolasi                 | 250,000 |
| 11  | NICU                    | 350,000 |
| Makan Pasien Rawat Inap Perhari               |                         |         |
| 12  | Kelas III               | 75,000  |
| 13  | Kelas II                | 80,000  |
| 14  | Kelas I/ Pasien Isolasi | 90,000  |
| 15  | Kelas Utama/VIP         | 100,000 |
| Tarif Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan |                         |         |
| 16  | Asuhan Keperawatan      | 15,000  |
| 17  | Asuhan Kebidanan        | 15,000  |

c. Tarif Rawat Gawat Darurat pada RSUD Batin Mangunang

| NO | JENIS PELAYANAN  | JUMLAH  |
|----|--|---------|
|    |  | (Rp)    |
| 1  | 2  | 3       |
| 1  | Pemeriksaan Dokter Umum                                  | 25,000  |
| 2  | Pemeriksaan Perawat IGD                                  | 15,000  |
| 3  | Pemasangan Infus Anak                                    | 50,000  |
| 4  | Pemasangan Infus Dewasa                                  | 35,000  |
| 5  | Pemasangan Infus Osseseus                                | 60,000  |
| 6  | Tindakan Suction   | 60,000  |
| 7  | Terapi DC Shok / Defibrilator                            | 90,000  |
| 8  | Resusitasi Janyung Paru Dewasa                           | 150,000 |
| 9  | Resusitasi Jantung Paru Anak / Bayi                      | 150,000 |
| 10 | Nebulizer  | 60,000  |
| 11 | Pemasangan NGT   | 75,000  |
| 12 | Pemasangan Endotrakea Tube (ET)                          | 150,000 |
| 13 | Pemasangan DC (Kateter)                                  | 75,000  |
| 14 | Pemasangan Spalk Infus Anak                              | 50,000  |
| 15 | Pemasangan Spalk Tungkai Atas (tangan)                   | 60,000  |
| NO | JENIS PELAYANAN  | JUMLAH  |
|    |  | (Rp)    |
| 16 | Pemasangan Spalk Tungkai Bawah (Kaki)                    | 75,000  |
| 17 | Nail Ekstraksi (Pencabutan Kuku)                         | 120,000 |
| 18 | Bilas Lambung  | 65,000  |
| 19 | Heacting 1-5   | 75,000  |
| 20 | Heacting 6 – 15  | 120,000 |
| 21 | Heacting 16- 20  | 200,000 |
| 22 | Heacting > 20  | 300,000 |
| 23 | Incisi Abses   | 120,000 |
| 24 | Incisi sedang  | 50,000  |
| 25 | Incisi Kecil   | 20,000  |
| 26 | Skin Test  | 15,000  |
| 27 | Angkat Jahitan   | 50,000  |
| 28 | Pasang Tamon Hidung / Epistaksis                         | 90,000  |
| 29 | Combustio Grade I  | 60,000  |
| 30 | Combustio Grade II                                       | 75,000  |
| 31 | Combustio Grade III                                      | 120,000 |
| 32 | Debridemen Luka Kecil                                    | 45,000  |
| 33 | Debridemen Luka digigit Binatang (diluar obat anti bisa) | 75,000  |
| 34 | Debridemen Luas  | 150,000 |
| 35 | Ekstrasi kulit karena Trauma                             | 50,000  |
| 36 | Ekstraksi Kuku   | 120,000 |



|    |   |         |
|----|---|---------|
| 37 | Luka lecet Ringan   | 30,000  |
| 38 | Luka Lecet Sedang   | 40,000  |
| 39 | Luka Lecet Berat  | 75,000  |
| 40 | Eksplorasi luka (tidak tembus)                              | 150,000 |
| 41 | Eksplorasi luka tusuk paku                                  | 75,000  |
| 42 | Suction   | 40,000  |
| 43 | DC Shock  | 210,000 |
| 44 | Pasang Gudel  | 40,000  |
| 45 | Monitor Vital Sign  | 90,000  |
| 46 | Injeksi   | 10,000  |
| 47 | Bebat Tekan Luka  | 60,000  |
| 48 | Pasang Elastic Perban                                       | 60,000  |
| 49 | Rectal / Vagina Toucher                                     | 40,000  |
| 50 | Visum   | 75,000  |
| 51 | Perawatan Bayi Baru Lahir di IGD                            | 40,000  |
| 52 | Incubator   | 60,000  |
| 53 | Syringe Pump  | 75,000  |
| 54 | Melepas kateter   | 12,000  |
| 55 | Melepas Infus   | 15,000  |
| 56 | Memasang O2   | 30,000  |
| 57 | Clisma  | 50,000  |
| 58 | Tampon Kebidanan  | 20,000  |
| 59 | Kompresi Bimanual   | 75,000  |
| 60 | Vulva Higiene   | 25,000  |
| 61 | Observasi dengan Pemasangan Monitor selama 6 jam            | 100,000 |
| 62 | Observasi tanpa Pemasangan Monitor selama 6 jam             | 75,000  |
| 63 | Observasi lebih dari 6 jam ditambah biaya observasi per jam | 50,000  |

2. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BATIN MANGUNANG BERDASARKAN JENIS PELAYANAN

a. Tarif Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang

1) Visite dan Pelayanan Konsultasi

| NO                            | JENIS PELAYANAN | JUMLAH  |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 | (Rp)    |
| 1                             | 2               | 3       |
| Tarif Visite Dokter Umum      |                 |         |
| 1                             | Reguler         | 65,000  |
| 2                             | Isolasi         | 80,000  |
| 3                             | ICU             | 80,000  |
| Tarif Visite Dokter Spesialis |                 |         |
| 4                             | Reguler         | 135,000 |
| 5                             | Isolasi         | 135,000 |
| 6                             | ICU             | 150,000 |

2) Pemeriksaan dan Tindakan Non Operatif

| Tarif Pelayanan Medis Tindakan Penyakit Dalam |                                     |         |
|---|-------------------------------------|---------|
| No.   | JENIS PELAYANAN                     | JUMLAH  |
|   |                                     | (Rp)    |
| 1   | 2                                   | 3       |
| 1   | Pemasangan WSD                      | 99,000  |
| 2   | Inhalasi Terapi                     | 15,000  |
| 3   | BMP ( <i>Bone Marrow Puncture</i> ) | 40,000  |
| 4   | Maag Corling                        | 60,000  |
| 5   | Aspirasi Cairan Lambung             | 60,000  |
| 6   | Aspirasi Cairan Pleura/Asirsi       | 200,000 |
| 7   | Lumbal Punksi                       | 130,000 |
| 8   | Pungtie Pleura                      | 80,000  |
| 9   | Asites Punksi                       | 80,000  |
| 10  | EKG                                 | 90,000  |
| Tarif Pelayanan Medis Tindakan Bedah          |                                     |         |
| No.   | JENIS PELAYANAN                     | JUMLAH  |
|   |                                     | (Rp)    |
| 1   | 2                                   | 3       |
| 1   | Perawatan Luka Ringan               | 30,000  |
| 2   | Perawatan Luka Sedang               | 40,000  |
| 3   | Angkat Jahitan < 6 jahitan          | 18,000  |
| 4   | Angkat Jahitan 6 - 10 jahitan       | 25,000  |
| 5   | Angkat Jahitan > 10 jahitan         | 30,000  |
| 6   | Buka Tampon                         | 10,000  |
| 7   | Pasang Kateter                      | 75,000  |
| 8   | Bilas Lambung                       | 65,000  |
| 9   | Pasang Kateter dengan Penyulit      | 100,000 |
| 10  | Pasang Infus                        | 35,000  |
| 11  | Jasa Pasang Ransel                  | 45,000  |

|    | Verband                                |         |
|----|--|---------|
| 12 | Pasang Spalk Kaki                      | 75,000  |
| 13 | Pasang Spalk Tangan                    | 60,000  |
| 14 | Vena Section                           | 225,000 |
| 15 | Fungsi Pleura                          | 156,000 |
| 16 | Fungsi Buli – Buli                     | 70,000  |
| 17 | Nebulizer                              | 60,000  |
| 18 | Penanganan Syok Ringan                 | 42,000  |
| 19 | Penanganan Syok Sedang                 | 85,000  |
| 20 | Penanganan Syok Berat                  | 125,000 |
| 21 | Pemasangan NGT                         | 75,000  |
| 22 | Penanganan Epitaksis                   | 45,000  |
| 23 | Penanganan Luka Bakar Kurang dari 50 % | 100,000 |
| 24 | Penanganan Luka Bakar Lebih dari 50 %  | 205,000 |
| 25 | Penatalaksanaan Kejang                 | 90,000  |
| 26 | Penatalaksanaan Luka Wajah             | 260,000 |
| 27 | Penatalaksanaan Vulnus Punctum         | 120,000 |
| 28 | Resusi Jantung Paru                    | 145,000 |
| 29 | Pemberian O2 per jam                   | 30,000  |
| 30 | Suction (per tindakan)                 | 40,000  |
| 31 | Skint Test                             | 15,000  |
| 32 | Pemeriksaan BSS (Gluko Test)           | 29,000  |
| 33 | Ramplet                                | 10,000  |
| 34 | Lavement (Hukna)                       | 20,000  |
| 35 | Perawatan Luka Gangraen                | 100,000 |
| 36 | Pengambilan sampel darah               | 30,000  |
| 37 | Pemasangan Transfusi Darah             | 30,000  |
| 38 | Injeksi                                | 10,000  |
| 39 | Sonde Fooding                          | 40,000  |
| 40 | Observasi Tanda Tanda Vital / kali     | 25,000  |
| 41 | Bed Side Monitor / Hari                | 100,000 |
| 42 | Pemberian Kompres                      | 20,000  |
| 43 | Aff Drain                              | 30,000  |
| 44 | Lepas NGT                              | 20,000  |
| 45 | Lepas kateter                          | 12,000  |

|    |                      |         |
|----|----------------------|---------|
| 46 | Lepas Infus          | 15,000  |
| 47 | Debridement Luka     | 75,000  |
| 48 | Exsisi, Insisi       | 46,000  |
| 49 | Exterpasi            | 137,000 |
| 50 | Combustio            |         |
| 51 | Grade I (< 25%)      | 60,000  |
| 52 | Grade II (25% - 50%) | 75,000  |
| 53 | Grade III (> 50%)    | 120,000 |
| 54 | WSD                  | 143,000 |
| 55 | Circumsisi           | 195,000 |
| 56 | Amputasi Jari        | 156,000 |
| 57 | Aff Hecting          | 25,000  |
| 58 | Ganti Perban         | 25,000  |
| 59 | Buka Gips            | 70,000  |
| 60 | Biopsi               | 700,000 |
| 61 | Rectal Touche        | 40,000  |

Tarif Pelayanan Medis Tindakan Pada Anak

| No. | JENIS PELAYANAN                             | JUMLAH    |
|-----|---|-----------|
|     |   | (Rp)      |
| 1   | 2   | 3         |
| 1   | Perawatan bayi CPAP/ hari                   | 1,500,000 |
| 2   | Ventilator / hari                           | 2,500,000 |
| 3   | Ganti Balutan Sederhana (GV)                | 40,000    |
| 4   | Imunisasi BCG                               | 15,000    |
| 5   | Imunisasi Hepatitis O                       | 20,000    |
| 6   | Pemberian Vaksin HbSAg                      | 55,000    |
| 7   | Campak (9 bln & 18 bln)                     | 20,000    |
| 8   | Hepatitis B+DIT+HIB                         | 30,000    |
| 9   | Pemeriksaan Neonatus                        | 25,000    |
| 10  | Infant Warmer per jam                       | 20,000    |
| 11  | Perawatan Bayi incubator perhari            | 150,000   |
| 12  | Perawatan Bayi Baru Lahir Perhari           | 100,000   |
| 13  | Perawatan Insentive Bayi Patologis (NICU)   | 240,000   |
| 14  | Perawatan Insentive Bayi Patologis (Perina) | 210,000   |
| 15  | Fototherapy NICU                            | 125,000   |
| 16  | Fototherapy Perina                          | 100,000   |
| 17  | Penanganan Epitaksis                        | 45,000    |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 18 | Mantoux Test   | 75,000  |
| 19 | Pemasangan Dauwer<br>CateterAnak / bayi                    | 65,000  |
| 20 | Pemasangan Dauwer<br>CateterAnak / bayi dengan<br>Penyulit | 120,000 |
| 21 | Pemasangan ETT anak  | 150,000 |
| 22 | Pemasangan ETT (Intubasi)<br>bayi                          | 550,000 |
| 23 | Pemasangan infus pada<br>anak /<br>bayi                    | 110,000 |
| 24 | Pemasangan NGT Anak  | 75,000  |
| 25 | Pemasangan NGT / OGT<br>Bayi(NICU)                         | 155,000 |
| 26 | Pemasangan NGT / OGT<br>Bayi(Perina)                       | 140,000 |
| 27 | Pemberian Susu melalui<br>NGT( NICU) / hari                | 315,000 |
| 28 | Pemberian Susu melalui<br>NGT( Perina) / hari              | 300,000 |
| 29 | Pemasangan Infus dengan<br>TaliPusat                       | 75,000  |
| 30 | Pemasangan Spalk Kaki<br>pada<br>Anak                      | 70,000  |
| 31 | Pemasangan Spalk Tangan<br>padaAnak                        | 60,000  |
| 32 | Perawatan Luka (NICU)                                      | 57,000  |
| 33 | Perawatan Luka (Perina)                                    | 50,000  |
| 34 | Perawatan Combustio <50<br>%pada anak / bayi               | 100,000 |
| 35 | Perawatan Combustio >50<br>%pada anak / bayi               | 205,000 |
| 36 | Resusitasi Bayi Patologis                                  | 670,000 |
| 37 | Resusitasi Bayi dengan SC                                  | 670,000 |
| 38 | Perawatan Tali Pusat<br>perhari                            | 50,000  |
| 39 | Memandikan Bayi Baru<br>Lahirperhari                       | 13,000  |
| 40 | Nebulizer  | 70,000  |
| 41 | Tindakan Suctioning (NICU)                                 | 57,000  |
| 42 | Tindakan Suctioning Bayi /<br>Anak                         | 42,000  |
| 43 | Bilas Lambung (NICU)                                       | 155,000 |
| 44 | Bilas Lambung Bayi / Anak                                  | 125,000 |
| 45 | Schorstein / Drumb Best<br>(NICU)                          | 57,000  |
| 46 | Schorstein / Drumb Best<br>(Perina)                        | 42,000  |
| 47 | Vena Seksi Bayi  | 300,000 |
| 48 | Syring Pump / hari (NICU)                                  | 155,000 |
| 39 | Memandikan Bayi Baru<br>Lahirperhari                       | 13,000  |
| 40 | Nebulizer  | 70,000  |
| 41 | Tindakan Suctioning (NICU)                                 | 57,000  |
| 42 | Tindakan Suctioning Bayi /<br>Anak                         | 42,000  |
| 43 | Bilas Lambung (NICU)                                       | 155,000 |
| 44 | Bilas Lambung Bayi / Anak                                  | 125,000 |
| 45 | Schorstein / Drumb Best<br>(NICU)                          | 57,000  |
| 46 | Schorstein / Drumb Best                                    | 42,000  |

|    |  |         |
|----|--|---------|
|    | (Perina)                                       |         |
| 47 | Vena Seksi Bayi                                | 300,000 |
| 48 | Syring Pump / hari (NICU)                      | 155,000 |
| 41 | Tindakan Suctioning (NICU)                     | 57,000  |
| 42 | Tindakan Suctioning Bayi / Anak                | 42,000  |
| 43 | Bilas Lambung (NICU)                           | 155,000 |
| 44 | Bilas Lambung Bayi / Anak                      | 125,000 |
| 45 | Schorstein / Drumb Best (NICU)                 | 57,000  |
| 46 | Schorstein / Drumb Best (Perina)               | 42,000  |
| 47 | Vena Seksi Bayi                                | 300,000 |
| 48 | Syring Pump / hari (NICU)                      | 155,000 |
| 44 | Bilas Lambung Bayi / Anak                      | 125,000 |
| 45 | Schorstein / Drumb Best (NICU)                 | 57,000  |
| 46 | Schorstein / Drumb Best (Perina)               | 42,000  |
| 47 | Vena Seksi Bayi                                | 300,000 |
| 48 | Syring Pump / hari (NICU)                      | 155,000 |
| 49 | Syring Pump / hari Bayi / Anak                 | 140,000 |
| 50 | Infuse pump / hari (NICU)                      | 155,000 |
| 51 | Infuse pump / hari Bayi / Anak                 | 140,000 |
| 52 | Penatalaksanaan kejang                         | 110,000 |
| 53 | Penanganan Syok Ringan                         | 45,000  |
| 54 | Penanganan Syok Sedang                         | 85,000  |
| 55 | Penanganan Syok Berat                          | 155,000 |
| 56 | Resusitasi Jantung Paru                        | 350,000 |
| 57 | Pemasangan Transfusi (NICU) / hari             | 155,000 |
| 58 | Pemasangan Transfusi Bayi / Anak / hari        | 140,000 |
| 59 | Perawatan Kangaroo Mother Care (NICU) / hari   | 60,000  |
| 60 | Perawatan Kangaroo Mother Care (Perina) / hari | 50,000  |
| 61 | Skin Test                                      | 20,000  |
| 62 | Pemeriksaan GDS Pada Bayi                      | 25,000  |
| 63 | Rumple Led                                     | 10,000  |
| 64 | Injeksi per tindakan IM / SC / IV              | 50,000  |
| 65 | Lepas Infus                                    | 15,000  |
| 66 | Pengambilan Sample Darah                       | 30,000  |
| 67 | Observasi TTV / hari                           | 150,000 |
| 68 | Penggunaan Oksigen / Tabung                    | 60,000  |
| 69 | Pemasangan Oksigen Perina                      | 42,500  |
| 70 | Pemasangan Oksigen NICU                        | 57,500  |
| 71 | Nebulizer                                      | 65,000  |
| 72 | Syring Pump / hari Bayi / Anak                 | 140,000 |
| 73 | Infuse pump / hari (NICU)                      | 155,000 |
| 74 | Infuse pump / hari Bayi / Anak                 | 140,000 |
| 75 | Penatalaksanaan kejang                         | 110,000 |
| 76 | Penanganan Syok Ringan                         | 45,000  |
| 77 | Penanganan Syok Sedang                         | 85,000  |
| 78 | Penanganan Syok Berat                          | 155,000 |
| 79 | Resusitasi Jantung Paru                        | 350,000 |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 80  | Pemasangan Transfusi (NICU) / hari   | 155,000 |
| 81  | Pemasangan Transfusi Bayi / Anak / hari                                    | 140,000 |
| 82  | Perawatan Kangaroo Mother Care (NICU)/ hari                                | 60,000  |
| 83  | Perawatan Kangaroo Mother Care (Perina)/ hari                              | 50,000  |
| 84  | Skin Test  | 20,000  |
| 85  | Pemeriksaan GDS Pada Bayi  | 25,000  |
| 86  | Rumple Led   | 10,000  |
| 87  | Injeksi per tindakan IM / SC / IV  | 50,000  |
| 88  | Lepas Infus  | 15,000  |
| 89  | Pengambilan Sample Darah   | 30,000  |
| 90  | Observasi TTV / hari   | 150,000 |
| 91  | Penggunaan Oksigen / Tabung  | 60,000  |
| 92  | Pemasangan Oksigen Perina  | 42,500  |
| 93  | Pemasangan Oksigen NICU  | 57,500  |
| 94  | Nebulizer  | 65,000  |
| Tarif Pelayanan Medis Kandungan dan Kebidanan |  |         |
| No.   | JENIS PELAYANAN  | JUMLAH  |
|   |  | (Rp)    |
| 1   | 2  | 3       |
| 1   | Pemasangan Implant   | 300,000 |
| 2   | Pemasangan Iud   | 250,000 |
| 3   | Pencabutan Iud/ implant  | 150,000 |
| 4   | Suntik KB  | 25,000  |
| 5   | Exterpasi Condilum Ocuminata   | 250,000 |
| 6   | Cateter Condilium Ocuminata  | 200,000 |
| 7   | Punksi Cavum Douglasi  | 300,000 |
| 8   | Biopsy Endometrium   | 200,000 |
| 9   | Embriotomy (pengangkatan bagian janin)                                     | 600,000 |
| 10  | Evakuasi Digital   | 300,000 |
| 11  | Hidrotubasi  | 450,000 |
| 12  | Versi Luar   | 150,000 |
| 13  | Pemasangan Infus melalui tali pusar  | 250,000 |
| 14  | Tampon Kebidanan   | 150,000 |
| 15  | Kompresi Bimanual  | 250,000 |
| 16  | Eksplorasi HPP   | 115,000 |
| 17  | Eksterpasi/Marsupialisasi Bartolini Abses                                  | 250,000 |
| 18  | Incisi Bartolini Abses   | 350,000 |
| 19  | Ganti Balutan Sederhana  | 50,000  |
| 20  | Heacting Euptur Perineum (Robekan Hingga Epitel Anus)                      | 400,000 |
| 21  | Heacting Ruptur Perineum Tingkat I Vaginal Mucosa                          | 100,000 |
| 22  | Heacting Ruptur Perineum Tingkat II (Vaginal Mucosa s.d Musculus perineal) | 200,000 |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 23  | Heacting Ruptur Perineum Tingkat III (Seluruh Perineum s.d otot sfingter Ani) | 300,000     |
| 24  | Exterpasi Candilum Ocuminata  | 52,000      |
| 25  | Cauter Condilum Ocuminata   | 59,000      |
| 26  | Visum   | 75,000      |
| 27  | Amnioskopi  | 70,000      |
| 28  | Biopsi / Papsmear   | 105,000     |
| Tarif Pelayanan Medis Tindakan Jantung      |   |             |
| NO  | Jenis Pelayanan   | Jumlah (Rp) |
| 1   | 2   | 3           |
| 1   | Cardio Versi  | 66,000      |
| 2   | Echo  | 240,000     |
| 3   | Treadmiil Test  | 210,000     |
| 4   | Coronary Intervention (PCI/Pemasangan Ring                                    | 3,000,000   |
| 5   | Coronary Intervention (PCI/Pemasangan Ring                                    | 19,000,000  |
| Tarif Pelayanan Medis Tindakan Medis Syaraf |   |             |
| NO  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH (Rp) |
| 1   | 2   | 3           |
| 1   | Injeksi titik syaraf  | 55,000      |
| 2   | Test Memori/MMSE  | 70,000      |
| 3   | Test Perpirasi  | 70,000      |
| 4   | Funduskopi  | 60,000      |
| 5   | Lumbal fungsi   | 200,000     |
| 6   | Dental  | 70,000      |
| 7   | Panoramik   | 130,000     |
| 8   | Cranium Ap/Lat  | 150,000     |
| 9   | Cervival Ap/Lat   | 150,000     |
| 10  | Pemeriksaan ENMG  | 250,000     |
| 11  | Injeksi intra artikuler   | 200,000     |
| Tarif Pelayanan Medis Tindakan Medis Umum   |   |             |
| NO  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH (Rp) |
| 1   | 2   | 3           |
| 1   | Pasang infuse Dewasa  | 50,000      |
| 2   | Melepas Infuse  | 25,000      |
| 3   | Pasang NGT  | 75,000      |
| 4   | Melepas NGT   | 25,000      |
| 5   | Pasang dower cateter Dewasa   | 50,000      |
| 6   | Melepas dower cateter   | 25,000      |
| 7   | Clisma  | 45,000      |
| 8   | Vena sectie   | 150,000     |
| 9   | Vulva higine  | 40,000      |
| 10  | Nebulizer   | 65,000      |
| 11  | Bilas lambung   | 150,000     |
| 12  | Aspirasi cairan lambung   | 175,000     |
| 13  | Jahit Luka Ringan 1 s/d 5 (lukasampai jaringan sub                            | 50,000      |



|    |  |           |
|----|--|-----------|
|    | kutan)   |           |
| 14 | Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5          | 5,000     |
| 15 | Jahit Luka Sedang (luka sampai otot)                   | 75,000    |
| 16 | Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5          | 7,000     |
| 17 | Jahit Luka Berat / pembuluh darah                      | 100,000   |
| 18 | Tambahan biaya per 1 heactingbila heacting >5          | 10,000    |
| 19 | Perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan) | 40,000    |
| 20 | Perawatan luka sedang (luka sampai otot)               | 50,000    |
| 21 | Perawatan luka berat / pembuluhdarah                   | 60,000    |
| 22 | Angkat jahitan   | 60,000    |
| 23 | Incisi/ ekskisi kecil (1 - 5 cm )                      | 60,000    |
| 24 | Incisi/ ekskisi sedang (6-15 cm)                       | 50,000    |
| 25 | Pemasangan spalk dewasa                                | 50,000    |
| 26 | Ransel verban  | 50,000    |
| 27 | Skin Test  | 10,000    |
| 28 | Combustio Grade I                                      | 200,000   |
| 29 | Combustio Grade II                                     | 250,000   |
| 30 | Combustio Grade III                                    | 300,000   |
| 31 | Explorasi corpus alianum dengan anastesi local         | 450,000   |
| 32 | Perawatan luka colostomy                               | 60,000    |
| 33 | Debridement luka tanpa anastesi                        | 150,000   |
| 34 | Ekstraksi kuku   | 200,000   |
| 35 | Tampon epistaksis                                      | 50,000    |
| 36 | Pasang ETT   | 200,000   |
| 37 | Explorasi corpus alianum di telinga/hidung             | 150,000   |
| 38 | Luka lecet multiple                                    | 60,000    |
| 39 | Exsisi granuloma                                       | 140,000   |
| 40 | Couter ringan (kulit)                                  | 200,000   |
| 41 | Couter sedang (kulit)                                  | 350,000   |
| 42 | Couter berat (kulit)                                   | 450,000   |
| 43 | Ektrasi kulit karena trauma                            | 35,000    |
| 44 | Explorasi dan exterpasicorpus alienum                  | 55,000    |
| 45 | Ganglion carpy (tumor jinak sendi)                     | 1,000,000 |
| 46 | Kista atheroma (tumor jinak)                           | 1,000,000 |
| 47 | Kista dermoid (kista tumor jinak kulit)                | 1,000,000 |
| 48 | Korpus alienum subkutan (benang asing dibawah kulit)   | 500,000   |
| 49 | Amputasi dengan anastesi local                         | 250,000   |
| 50 | Circumsisi (khitan)                                    | 500,000   |
| 51 | Circumsisi dengan penyulit                             | 750,000   |
| 52 | Insisi hordeolum                                       | 650,000   |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 53  | Irigasi mata                               | 75,000  |
| 54  | Corpus alienum                             | 95,000  |
| 55  | Pemeriksaan mata sederhana                 | 75,000  |
| 56  | Peteregium                                 | 750,000 |
| 57  | Kalazion                                   | 350,000 |
| 58  | Corpus                                     | 70,000  |
| 59  | Spuling telinga                            | 70,000  |
| 60  | Explorasi cospus alienum ditelinga/hidung  | 175,000 |
| 61  | Lobuloplasty (repair lubang telinga)       | 200,000 |
| 62  | Meatotomi urethra                          | 175,000 |
| 63  | Pemasangan Endo Tharakealtube (ET)         | 200,000 |
| 64  | Resusitasi Jantung Paru                    | 200,000 |
| 65  | Pungsi pleura                              | 300,000 |
| 66  | Pungsi abses hati                          | 400,000 |
| 67  | Pungsi pada asites                         | 300,000 |
| 68  | Pungsi cairan asceites per magna           | 300,000 |
| 69  | Pungsi cairan sendi                        | 300,000 |
| 70  | Pungsi lumbal/sumsum tulang(BMP)           | 300,000 |
| 71  | Pungsi pericardical                        | 300,000 |
| 72  | Pungsi subdural                            | 300,000 |
| 73  | Pungsi haematoma                           | 300,000 |
| 74  | Pungsi vesica urinaria                     | 300,000 |
| 75  | Resusitasi jantung dan paru-paru           | 250,000 |
| 76  | Strapping sractur costa                    | 150,000 |
| 77  | Terapi “DC Shock”/tindakan defibrillator   | 200,000 |
| 78  | Tindakan suction                           | 75,000  |
| 79  | Water seal drainage                        | 350,000 |
| Tarif Tindakan Medis Kesehatan Jiwa / Psikiatri |  |         |
| NO  | JENIS PELAYANAN                            | JUMLAH  |
|   |  | (Rp)    |
| 1   | 2  | 3       |
| 1   | Assemen Awal                               | 75,000  |
| 2   | Fiksasi Mekanik Kimiawi                    | 50,000  |
| 3   | Deteksi Dini / Screening ( Mini SCL ), dll | 30,000  |
| 4   | MMPI                                       | 200,000 |
| 5   | Psikoterapi Suportif                       | 100,000 |
| 6   | Psikoterapi Lainnya                        | 150,000 |
| 7   | Psiko Analisis                             | 150,000 |
| 8   | Hipnoterapi                                | 200,000 |
| 9   | Krisis Intervensi                          | 150,000 |
| 10  | Terapi Perilaku/Jam                        | 30,000  |
| 11  | Play Terapi/Jam                            | 30,000  |
| 12  | Psikoterapi Verbal atau Lanjutan/Jam       | 30,000  |
| 13  | Psikoterapi Evaluasi Komitmen              | 50,000  |
| 14  | Terapi Keluarga                            | 50,000  |
| 15  | Konseling Adiksi/Alkohol, dll/Jam          | 30,000  |

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| 16                         | Indepth Interview   | 100,000   |
| 17                         | Terapi Okupasi  | 30,000    |
| 18                         | SKKJ ( Wawancara + MMPI )                                     | 250,000   |
| 19                         | Home Visit  | 150,000   |
| 20                         | Marital Therapi / Couple Therapi                              | 150,000   |
| Tarif Pelayanan Medis Mata |   | Jumlah    |
| No                         | Jenis Pelayanan   |           |
| 1                          | Pemeriksaan Sederhana   | 35,400    |
| 2                          | Pemeriksaan Visus   | 35,400    |
| 3                          | Pemeriksaan Buta Warna  | 35,400    |
| 4                          | Limited Eye Examination                                       | 190,400   |
| 5                          | Comprehensive eye Exammination                                | 221,800   |
| 6                          | Visual Field Study  | 221,800   |
| 7                          | Color Vision Study  | 221,800   |
| 8                          | Fundus Fotography   | 250,000   |
| 9                          | Fluorescoinfundus Angiography                                 | 250,000   |
| 10                         | Ultrasound study of eye                                       | 250,000   |
| 11                         | X-Ray Study of eye  | 250,000   |
| 12                         | Ocular Motility Study   | 221,800   |
| 13                         | ERG   | 250,000   |
| 14                         | EOG   | 250,000   |
| 15                         | VEP   | 221,800   |
| 16                         | ENG   | 250,000   |
| 17                         | EMG   | 250,000   |
| 18                         | Tonography (Glaucoma Testing)                                 | 250,000   |
| 19                         | Tonometry   | 221,800   |
| 20                         | Ophthalmoscopy  | 221,800   |
| 21                         | Other Diagnostic Procedures on Conjunctiva                    | 266,100   |
| 22                         | Subconjunctival Injection                                     | 266,100   |
| 23                         | Scraping of Cornea  | 529,000   |
| 24                         | Other Diagnostic Procedures on Cornea                         | 529,000   |
| 25                         | Other Excision of Pterygium                                   | 925,700   |
| 26                         | Phacoemulsification   | 7,276,600 |
| 27                         | Discission of Secondary Membrane (After Cataact)              | 3,638,300 |
| 28                         | Destruction of Chorioretinal Lesion by Diathermy              | 1,548,600 |
| 29                         | Distruction of Chorioretinal Lesion by Cryotherapy            | 1,548,600 |
| 30                         | Distruction of Chorioretinal Lesion by Laser Photocoagulation | 494,900   |
| 31                         | Removal of Siperflcial foreign Body From Eye Without          | 266,100   |
| 32                         | Pemeriksaan Rawat Jalan                                       | 186,800   |
| 33                         | YAG Laser   | 3,465,000 |

|    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| 34 | MRI                | 2,664,100 |
| 35 | Cross Linking      | 2,251,800 |
| 36 | Laser Bararage     | 1,369,900 |
| 37 | CT Scan Orbital    | 1,075,500 |
| 38 | FFA                | 710,600   |
| 39 | Laser PRP          | 830,200   |
| 40 | Laser Glaukoma     | 420,300   |
| 41 | Perimetri/Humphrey | 233,900   |
| 42 | Oct                | 288,100   |
| 43 | USG Mata           | 288,100   |
| 44 | Foto Fundus        | 288,100   |

3) Tindakan Operatif  
a. Pelayanan Medik Operatif Umum

1. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,100,000 |
| 2  | Sedang          | 2,180,000 |
| 3  | Besar           | 2,950,000 |
| 4  | Khusus          | 3,850,000 |

2. Pelayanan Medik Operatif Kelas II

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,320,000 |
| 2  | Sedang          | 2,610,000 |
| 3  | Besar           | 3,540,000 |
| 4  | Khusus          | 4,620,000 |

3. Pelayanan Medik Operatif Kelas I

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,980,000 |
| 2  | Sedang          | 3,924,000 |
| 3  | Besar           | 5,310,000 |
| 4  | Khusus          | 6,930,000 |

4. Pelayanan Medik Operatif VIP

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 2,300,000 |
| 2  | Sedang          | 4,300,000 |
| 3  | Besar           | 5,800,000 |
| 4  | Khusus          | 8,000,000 |

b. Pelayanan Medik Operasi THT

1. Pelayanan Operatif Kelas I

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,000,000 |
| 2  | Sedang          | 1,800,000 |
| 3  | Besar           | 2,300,000 |
| 4  | Khusus          | 2,700,000 |

2. Pelayanan Operatif Kelas II

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 900,000   |
| 2  | Sedang          | 1,500,000 |
| 3  | Besar           | 2,100,000 |
| 4  | Khusus          | 2,400,000 |

3. Pelayanan Operatif Kelas III

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 750,000   |
| 2  | Sedang          | 1,200,000 |
| 3  | Besar           | 1,800,000 |
| 4  | Khusus          | 2,000,000 |

4. Pelayanan Operatif VIP

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,200,000 |
| 2  | Sedang          | 2,200,000 |
| 3  | Besar           | 2,700,000 |
| 4  | Khusus          | 3,000,000 |

c. Pelayanan Kamar Operasi Mata

| NO | JENIS PELAYANAN                             | JUMLAH    |
|----|---|-----------|
|    |   | (Rp)      |
| 1  | 2   | 3         |
| A. | OPERASI KECIL (SATU MATA)                   |           |
| 1  | Hordeolum                                   | 500,000   |
| 2  | Benda Asing                                 |           |
|    | - Conjunctiva                               | 80,000    |
|    | - Cornea                                    | 150,000   |
| 3  | Lithiasis                                   | 120,000   |
| 4  | Intubasi Ductus Naso                        | 100,000   |
| 5  | Irigasi Bola Mata                           | 110,000   |
| 6  | Epilasi                                     | 70,000    |
| 7  | Suntikan Sub Konjungtiva                    | 90,000    |
| 8  | Angkat Jahitan                              | 65,000    |
| 9  | Granuloma                                   | 85,000    |
| 10 | Kalazion                                    | 85,000    |
| 11 | Incisi Milia                                | 70,000    |
| B. | OPERASI SEDANG (SATU MATA)                  |           |
| 1  | Pterygium dengan Bascklera                  | 700,000   |
| 2  | Pterygium dengan Graft                      | 1,500,000 |
| 3  | Robekan Palpebra < 2 cm                     | 300,000   |
| 4  | Robekan Konjungtiva (Jahitan Konjungtiva)   | 360,000   |
| 5  | Tarsorapi                                   | 700,000   |
| 6  | Xanthalesma                                 | 720,000   |
| 7  | Keraktektomi                                | 120,000   |
| 8  | Graft Amnion                                | 1,020,000 |
| 9  | Flap Konjungtiva                            | 840,000   |
| 10 | Jahitan Kelopak Mata > 2 cm Mengenai Margo  | 1,200,000 |
| 11 | Reposisi Iris Prolap                        | 660,000   |
| 12 | Vitrektomi Interior                         | 840,000   |
| 13 | Kerokan dan Debridement Kornea              | 96,000    |
| 14 | Probing (untuk Therapeutic)                 | 90,000    |
| 15 | Training Low Vision                         | 80,000    |
| 16 | Revisi Bleb                                 | 950,000   |
| 17 | Training Low Vision                         | 1,000,000 |
| C  | OPERASI BESAR                               |           |
| 1  | Eviserasi / E nukleasi                      | 3,700,000 |
| 2  | ECCE / ICCE                                 | 1,800,000 |
| 3  | ECCE / IOL                                  | 2,450,000 |
| 4  | Trabekulektomi                              | 1,200,000 |
| 5  | ECCE / ICCE Trabekulektomi                  | 3,200,000 |
| 6  | Robekan Korneosklera                        | 1,650,000 |
| 7  | Parasintesa                                 | 750,000   |
| 8  | Phaco + IOL                                 | 6,600,000 |
| 9  | Sics (Small Incisi - Cataray Surgery + IOL) | 2,620,000 |
| 10 | ECCE + IOL + Trabekulektomi                 | 2,860,000 |
| 11 | Iridektomi                                  | 3,480,000 |
| 12 | Iridotomi                                   | 480,000   |
| 13 | Undermine Simblepharon                      | 1,350,000 |
| 14 | Jahitan Kornea (tanpa perporasi)            | 960,000   |

|    |                                     |           |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 15 | Jahitan Kornea (dengan perporasi)   | 3,000,000 |
| D  | OPERASI KHUSUS                      |           |
| 1  | Blepharo Plasti (satu kelopak mata) | 960,000   |

d. Pelayanan Medik Operatif Gigi dan Mulut

1. Pelayanan Medik Operatif Kelas III

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,100,000 |
| 2  | Sedang          | 2,800,000 |
| 3  | Besar           | 2,950,000 |
| 4  | Khusus          | 3,850,000 |

2. Pelayanan Medik Operatif Kelas II

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,320,000 |
| 2  | Sedang          | 2,610,000 |
| 3  | Besar           | 3,540,000 |
| 4  | Khusus          | 4,620,000 |

3. Pelayanan Medik Operatif Kelas I

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH    |
|----|-----------------|-----------|
|    |                 | (Rp)      |
| 1  | 2               | 3         |
| 1  | Kecil           | 1,980,000 |
| 2  | Sedang          | 3,924,000 |
| 3  | Besar           | 5,310,000 |
| 4  | Khusus          | 6,930,000 |

4. Pelayanan Medik Operatif VIP

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH     |
|----|-----------------|------------|
|    |                 | (Rp)       |
| 1  | 2               | 3          |
| 1  | Kecil           | 2,970,000  |
| 2  | Sedang          | 5,886,000  |
| 3  | Besar           | 7,965,000  |
| 4  | Khusus          | 10,395,000 |

#### 4) Persalinan

| NO  | JENIS PELAYANAN                 | JUMLAH    |
|---|---------------------------------|-----------|
|   |                                 | (Rp)      |
| 1   | 2                               | 3         |
| Persalinan normal                                   |                                 |           |
| Kelas III   |                                 |           |
| 1   | Tindakan Dokter Umum            | 600,000   |
| 2   | Tindakan Dokter Ahli            | 1,000,000 |
| Kelas II  |                                 |           |
| 3   | Tindakan Dokter Umum            | 800,000   |
| 4   | Tindakan Dokter Ahli            | 1,200,000 |
| Kelas I   |                                 |           |
| 5   | Tindakan Dokter Umum            | 1,000,000 |
| 6   | Tindakan Dokter Ahli            | 1,500,000 |
| Kelas Utama   |                                 |           |
| 7   | Tindakan Dokter Umum            | 1,100,000 |
| 8   | Tindakan Dokter Ahli            | 1,800,000 |
| Persalinan dengan stimulant/induksi/kembar/sungsang |                                 |           |
| 9   | Kelas III                       | 1,200,000 |
| 10  | Kelas II                        | 1,500,000 |
| 11  | Kelas I                         | 1,800,000 |
| 12  | Kelas Utama                     | 2,000,000 |
| Persalinan andib/forcep                             |                                 |           |
| 13  | Kelas III                       | 1,500,000 |
| 14  | Kelas II                        | 1,750,000 |
| 15  | Kelas I                         | 2,000,000 |
| 16  | Kelas Utama                     | 2,250,000 |
| Persalinan manual plasenta                          |                                 |           |
| 17  | Kelas III                       | 500,000   |
| 18  | Kelas II                        | 750,000   |
| 19  | Kelas I                         | 1,000,000 |
| 20  | Kelas Utama                     | 1,250,000 |
| 21  | Perawatan Bayi Baru Lahir Sehat | 50,000    |
| Resusitasi bayi baru lahir                          |                                 |           |
| Kelas III   |                                 |           |
| 22  | Tindakan Dokter Umum            | 200,000   |
| 23  | Tindakan Dokter Ahli            | 500,000   |
| Kelas II  |                                 |           |
| 24  | Tindakan Dokter Umum            | 250,000   |
| 25  | Tindakan Dokter Ahli            | 600,000   |
| Kelas I   |                                 |           |
| 26  | Tindakan Dokter Umum            | 300,000   |
| 27  | Tindakan Dokter Ahli            | 700,000   |
| Kelas Utama/VIP                                     |                                 |           |
| 28  | Tindakan Dokter Umum            | 400,000   |
| 29  | Tindakan Dokter Ahli            | 900,000   |



a. Tarif Pelayanan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah BatinMangunang

| Tarif Pelayanan Laboratorium |  |         |
|------------------------------|--|---------|
| NO                           | JENIS PELAYANAN  | JUMLAH  |
|                              |  | (Rp)    |
| 1                            | 2  | 3       |
| A.                           | Pemeriksaan Patologi Klinik  |         |
| 1.                           | Hematologi   |         |
|                              | Paket Darah Rutin (HB, HT, Leukosit, Trombosit, Eritrosit)   | 70,000  |
|                              | Paket darah Lengkap / Complete Blood Count (paket Darah Rutin + LED + Diff Count + Indeks Eritrosit) | 90,000  |
|                              | Hemoglobin   | 20,000  |
|                              | LED (Laju Endap Darah)   | 20,000  |
|                              | Hitung Jenis Leukosit (Differential Count)   | 80,000  |
|                              | Jumlah Retikulosit   | 100,000 |
|                              | Indeks Eritrosit (MCV, MCH, MCHC)  | 35,000  |
| 2.                           | Hematologi Lainnya   |         |
|                              | Asam Folat   | 325,000 |
|                              | Autologous Serum   | 10,000  |
|                              | Ferritin   | 85,000  |
|                              | G-6PD  | 75,000  |
|                              | Hapusan Darah Tepi / Malaria   | 40,000  |
|                              | Hb Elektroforosis  | 175,000 |
|                              | HbF  | 125,000 |
|                              | Morfologi Darah Tepi   | 100,000 |
|                              | Pewarnaan Sumsum Tulang  | 150,000 |
|                              | Serum Iron (Fe)  | 55,000  |
|                              | SIBC   | 60,000  |
|                              | Tes Coombs Direk   | 95,000  |
|                              | Tes Coombs Indirek   | 95,000  |
|                              | Paket Tes Coombs Direk & Indirek   | 185,000 |
|                              | TIBC   | 75,000  |
|                              | Transferrin  | 100,000 |
|                              | Vitamin B12  | 350,000 |
| 3.                           | Hemostatis   |         |
|                              | Activated Partial Thombine Time (APTT)   | 100,000 |
|                              | Agregasi Trombosit (ADP)   | 145,000 |
|                              | Anti Faktor Xa   | 180,000 |
|                              | Anti Trombin III   | 120,000 |
|                              | Beta 2 Glycoprotein 1  | 450,000 |
|                              | D-Dimer  | 315,000 |
|                              | Faktor VIII  | 225,000 |
|                              | Faktor IX  | 225,000 |
|                              | Faktor Von Willebrands   | 175,000 |
|                              | Fibrinogen   | 120,000 |
|                              | INR  | 85,000  |
|                              | Inhibitor VIII   | 225,000 |
|                              | IT Rasio   | 25,000  |

|     |                                     |         |
|-----|-------------------------------------|---------|
|     | Lupus Anticoagulan                  | 170,000 |
|     | Masa Pembekuan (Clotting Time)      | 15,000  |
|     | Masa Pendarahan (Bleeding Time)     | 15,000  |
|     | Paket Hemostatis (PT, APTT, INR)    | 250,000 |
|     | Prothrombin Time (PT)               | 100,000 |
|     | Thrombin Time (TT)                  | 95,000  |
|     | Protein C                           | 250,000 |
|     | Protein S                           | 250,000 |
|     | Thomboplastin Generation Test (TOT) | 100,000 |
| 4.  | Kimia Darah                         |         |
| 4.1 | Diabetes                            |         |
|     | Glukosa Darah Sewaktu               | 25,000  |
|     | Glukosa Darah Puasa                 | 25,000  |
|     | Glukosa Darah 2 Jam PP              | 25,000  |
|     | Glukosa Darah (Rapid / POCT)        | 25,000  |
|     | HbA1C                               | 185,000 |
|     | Test Toleransi Glukosa Oral         | 30,000  |
| 4.2 | Fungsi Hati                         |         |
|     | Albumin                             | 25,000  |
|     | Alkaline Fosfatase                  | 25,000  |
|     | Bilirubin Direk                     | 35,000  |
|     | Bilirubin Indirek                   | 30,000  |
|     | Bilirubin Total                     | 35,000  |
|     | Gamma GT                            | 30,000  |
|     | Kolinesterase                       | 25,000  |
|     | Protein Total                       | 30,000  |
|     | SGOT / AST                          | 30,000  |
|     | SGPT / ALT                          | 30,000  |
| 4.3 | Fungsi Ginjal                       |         |
|     | Asam Urat                           | 30,000  |
|     | BUN                                 | 35,000  |
|     | Creatinin                           | 30,000  |
|     | Creatinine Clearance                | 50,000  |
|     | Ureum                               | 30,000  |
| 4.4 | Profil Lipid                        |         |
|     | Kolesterol Total                    | 30,000  |
|     | Kolesterol HDL                      | 50,000  |
|     | Kolesterol LDL                      | 100,000 |
|     | Trigliserida                        | 30,000  |
| 4.5 | Fungsi Jantung                      |         |
|     | CK                                  | 85,000  |
|     | CK – MB                             | 105,000 |
|     | h- FABP                             | 185,000 |
|     | LDH                                 | 70,000  |
|     | Troponin – I                        | 255,000 |
|     | Troponin – T                        | 205,000 |
|     | Hs – CRP                            | 100,000 |
| 4.6 | Elektrolit                          |         |
|     | Kalium Darah                        | 55,000  |
|     | Kalsium Darah                       | 55,000  |
|     | Kalsium Ion                         | 65,000  |
|     | Klorida Darah                       | 55,000  |
|     | Magnesium Darah                     | 55,000  |

|     |                              |           |
|-----|------------------------------|-----------|
|     | Natrium Darah                | 55,000    |
|     | Paket Elektrolit (Na, K, Cl) | 200,000   |
| 4.7 | Gas Darah                    |           |
|     | Analisis Gas Darah (AGD)     | 200,000   |
| 5.  | Imminoserologi               |           |
|     | Aca IgG                      | 350,000   |
|     | Aca IgM                      | 350,000   |
|     | Ag M. Tbc rapid              | 120,000   |
|     | ANA                          | 20,000    |
|     | Anti Amuba                   | 150,000   |
|     | Anti Chlamydia total         | 200,000   |
|     | Anti Ds – DNA                | 250,000   |
|     | Anti HAV IgM (Rapid)         | 75,000    |
|     | Anti HBc (Rapid)             | 120,000   |
|     | Anti Hbe (Rapid)             | 200,000   |
|     | Anti HBs Kuantatif           | 32,500    |
|     | Anti HBs (Rapid)             | 45,000    |
|     | Anti HIV                     | 95,000    |
|     | Anti Influenza A-B           | 150,000   |
|     | Anti Japanese B-Encephalitis | 225,000   |
|     | Anti M TBC (Rapid)           | 115,000   |
|     | Anti Malaria                 | 150,000   |
|     | ASTO / ASO (Kuanlitatif)     | 65,000    |
|     | ASTO / ASO (Kuantitatif)     | 85,000    |
|     | CD 4                         | 250,000   |
|     | CMV IgM Avidity              | 200,000   |
|     | CRP (Kualitatif)             | 55,000    |
|     | CRP (Kuantitatif)            | 75,000    |
|     | Dengue IgG IgM (Rapid)       | 100,000   |
|     | Dengue Nsl Antigen (Rapid)   | 150,000   |
|     | HbeAg (Rapid)                | 185,000   |
|     | HbeAg (Kuantitatif)          | 75,000    |
|     | HbsAg (Rapid)                | 42,000    |
|     | Ig E Total                   | 175,000   |
|     | IgG Anti Chlamydia           | 125,000   |
|     | IgG Anti CMV                 | 75,000    |
|     | IgG Anti H. Pylori           | 75,000    |
|     | IgG Anti HVS 1               | 120,000   |
|     | IgG Anti HVS 2               | 120,000   |
|     | IgG Anti Rubella             | 150,000   |
|     | IgG Anti Toxoplasma          | 150,000   |
|     | IgM Anti Chikungunya         | 200,000   |
|     | IgM Anti Chlamydia           | 125,000   |
|     | IgM Anti CMV                 | 75,000    |
|     | IgM Anti H. Phylori          | 75,000    |
|     | IgM Anti HAV                 | 125,000   |
|     | IgM Anti HVS I               | 120,000   |
|     | IgM Anti HVS 2               | 120,000   |
|     | IgM Anti Leptospira          | 150,000   |
|     | IgM Anti Rubella             | 150,000   |
|     | IgM Anti Toxoplasma          | 150,000   |
|     | IgM Anti HBc                 | 100,000   |
|     | IgM S. Typhi (Rapid)         | 105,000   |
|     | IgM Syphilis (Rapid)         | 100,000   |
|     | Paket TORCH (Toxoplasma,     | 1,100,000 |

|    |  |         |
|----|--|---------|
|    | Rubella, Cytomegalovirus, Herpes)      |         |
|    | PCR TB                                 | 250,000 |
|    | RPR                                    | 55,000  |
|    | Rheumatoid Factor                      | 50,000  |
|    | TPHA                                   | 50,000  |
|    | VDRL                                   | 125,000 |
|    | Widal                                  | 55,000  |
|    | Tubex                                  | 200,000 |
|    | Golongan Darah A, B, O + Rhesus Factor | 20,000  |
| 6. | Tumor Marker                           |         |
|    | AFP                                    | 120,000 |
|    | Ca 15-3                                | 210,000 |
|    | Ca 19-9                                | 225,000 |
|    | Ca - 125                               | 265,000 |
|    | CEA                                    | 125,000 |
|    | PSA Total                              | 185,000 |
|    | Free PSA                               | 375,000 |
|    | NSE                                    | 295,000 |
|    | Ca - 72.4                              | 475,000 |
|    | CYFRA 21.1                             | 345,000 |
|    | SCC                                    | 245,000 |
|    | MCA                                    | 125,000 |
| 7. | Hormon                                 |         |
|    | Beta HCG Kuantitatif                   | 190,000 |
|    | Calcitonin                             | 650,000 |
|    | Estradiol                              | 190,000 |
|    | Free T3 (F T3)                         | 200,000 |
|    | Free T4 (F T4)                         | 175,000 |
|    | FSH                                    | 200,000 |
|    | FTI                                    | 175,000 |
|    | LH                                     | 165,000 |
|    | Progesteron                            | 195,000 |
|    | Prolaktin                              | 165,000 |
|    | T3                                     | 100,000 |
|    | T3 Uptake                              | 85,000  |
|    | T4                                     | 100,000 |
|    | Testoteron                             | 185,000 |
|    | TSH                                    | 115,000 |
|    | TSHs                                   | 125,000 |
|    | Procalcitonin                          | 550,000 |
| 8. | Urinalisis                             |         |
|    | Urinalisis Lengkap                     | 40,000  |
|    | Sedimen                                | 20,000  |
|    | Asam Urat Urine                        | 25,000  |
|    | Creatinin Urine                        | 25,000  |
|    | Glukosa Urine                          | 15,500  |
|    | Kalium Urine                           | 25,000  |
|    | Klorida Urine                          | 25,000  |
|    | Mikroalbumin Urine                     | 18,500  |
|    | Natrium Urine                          | 25,000  |
|    | Protein Bence - Jones                  | 27,500  |
|    | Protein Esbach                         | 18,500  |
|    | Protein Kuantitatif                    | 32,500  |
|    | Protein Urine                          | 15,000  |

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
|     | Tes Kehamilan (HCG) / PP Tes (Rapid                     | 25,000    |
|     | Ureum Urine   | 30,000    |
| 9.  | Tes Narkoba   |           |
|     | Paket Tes Narkoba (AMP, BZO, THC, MOP, METH, COC)       | 230,000   |
| 10. | Analisis Faeces   |           |
|     | Faeces Lengkap (Faeces Rutin + Darah Samar)             | 50,000    |
|     | Faeces Rutin  | 30,000    |
|     | Tes Darah Samar (FOB)                                   | 40,000    |
| 11. | Analisis Cairan Tubuh                                   |           |
|     | Analisis Cairan Otak (CSF)                              | 150,000   |
|     | Analisis Cairan Pleura                                  | 135,000   |
|     | Analisis Sperma   | 75,000    |
|     | Analisis Cairan Sendi                                   | 100,000   |
| 12. | monitoring obat   |           |
|     | Aminolhyllin / Theophyllin                              | 75,000    |
|     | Digoxin   | 80,000    |
|     | Phenobarbital   | 80,000    |
| B   | Pemeriksaan Patologi Anatomi                            |           |
| 1.  | Histopatologi   |           |
|     | Biopsi Jaringan (< 3cm, +- 5cc)                         | 300,000   |
|     | Biopsi Jaringan (> 3 cm)                                | 450,000   |
|     | Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)             | 550,000   |
|     | VC Jaringan (Potong Beku)                               | 1,500,000 |
|     | Cell Blok   | 300,000   |
| 2.  | Sitologi  |           |
|     | FNAB superfisial  | 500,000   |
|     | FNAB deep/guiding                                       | 750,000   |
|     | Papanicolau Smear                                       | 150,000   |
|     | Papanicolau Smear dengan tindakan                       | 300,000   |
|     | Sitologi Cairan   | 300,000   |
| C.  | Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik                         |           |
|     | Paket Pewarnaan Sputum BTA 3 x (Sewaktu, Pagi, Sewaktu) | 75,000    |
|     | Pewarnaan BTA Kulit / Cairan Tubuh                      | 35,000    |
|     | Kultur BTA  | 160,000   |
|     | Kultur Cairan Tubuh                                     | 155,000   |
|     | Kultur Darah  | 155,000   |
|     | Kultur Faeces   | 155,000   |
|     | Kultur Gall   | 125,000   |
|     | Kultur Mikroorganisme                                   | 155,000   |
|     | Kultur Pus  | 155,000   |
|     | Kultur Sekret   | 155,000   |
|     | Kultur Sputum   | 155,000   |
|     | Kultur SS (Salmonella / Shigella)                       | 165,000   |
|     | Kultur Urine  | 125,000   |
|     | Pewarnaan GO  | 32,000    |
|     | Pewarnaan Gram  | 30,000    |
|     | Pewarnaan Jamur   | 30,000    |
|     | Pewarnaan Negatif                                       | 30,000    |
|     | Pemeriksaan TCM (Tes Cepat                              | 250,000   |

|  | Molekuler) / GenXpert   |                |
|--|---|----------------|
| Tarif Pelayanan Diagnostik Khusus  |   |                |
| NO   | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1  | 2   | 3              |
| 1  | Rinolangoskopi Fleksibel  | 300,000        |
| 2  | Fees  | 500,000        |
| 3  | Pasang NGT Guilding   | 250,000        |
| 4  | Pasang NGT tanpa Guilding   | 200,000        |
| 5  | Esofagoendoskopi Fleksibel  | 850,000        |
| 6  | Sleepnasoendoskopi  | 950,000        |
| 7  | Ekstraksi BA dengan RFL   | 600,000        |
| 8  | Biopsi Endoskopi  | 700,000        |
| 9  | Transnasal Esophagoskopi  | 950,000        |
| Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik   |   |                |
| NO   | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1  | 2   | 3              |
| 1  | Massage   | 100,000        |
| 2  | Traksi  | 100,000        |
| 3  | Exercise Therapy  | 100,000        |
| 4  | Short Wave Diathermy  | 85,000         |
| 5  | Parafin Bath  | 85,000         |
| 6  | Faradisasi  | 85,000         |
| 7  | Ultraviolet   | 85,000         |
| 8  | Infra Red   | 85,000         |
| 9  | Elektrikal Stimulasi  | 85,000         |
| 10   | Hydroterapi   | 85,000         |
| 11   | Micro Wave Diathermy  | 85,000         |
| 12   | Shock Wave Therapy  | 85,000         |
| 13   | Ultra Sound Diathermy   | 85,000         |
| 14   | TENS  | 85,000         |
| Tarif Pelayanan Darah  |   |                |
| No.  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1  | 2   | 3              |
| 1  | Tranfusi darah ( Darah/kantong + Crtossmatch)   | 360,000        |
| 2  | Phlebotomi/ pengambilan darah   | 96,000         |
| 3  | Pemeriksaan Hb  | 26,000         |
| 4  | Konfirmasi Golongan Darah (Pemeriksaan Golongan Darah ABO dan Rhesus, ditambah Pemeriksaan Hb) Catatan : dilakukan pada calon donor darah | 18,000         |
| 5  | Crossmathch   | 75,000         |
| 6  | Tindakan Transfusi Darah  | 45,000         |
| 7  | Pemeriksaan HBs Ag  | 20,000         |
| 8  | Pemeriksaan HCV   | 37,000         |
| 9  | Pemeriksaan HIV   | 22,000         |
| 10   | Pemeriksaan Syphillis   | 21,000         |
| 11   | Hemodialisa   | 1,200,000      |
| - Pemeriksaan penderita di ICU disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi      |   |                |
| - Biaya konsultasi Dokter Spesialis disesuaikan dengan tarif tiap konsultasi |   |                |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| - Tarif pelayanan laboratorium belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP |   |                |
| Tarif Pelayanan Farmasi   |   |                |
| NO  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1   | 2   | 3              |
| Non racikan   |   |                |
| 1   | Non racikan   | 3,500          |
| Racikan   |   |                |
| 2   | Puyer & Kapsul  |                |
|   | 1 sd 30   | 6,000          |
|   | 31 sd 60  | 8,000          |
|   | 61 sd 90  | 10,000         |
| Salep per pot   |   |                |
| 3   | Salep per pot   | 5,000          |
| Tarif Pelayanan Gizi  |   |                |
| NO  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1   | 2   | 3              |
| 1   | Konseling Gizi  | 30,000         |
| 2   | Konsultasi Penata Gizi untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain | 35,000         |
| Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah   |   |                |
| NO  | JENIS PELAYANAN   | JUMLAH<br>(Rp) |
| 1   | 2   | 3              |
| Biaya pemulasaran jenazah (per tindakan)  |   |                |
| 1   | Pemandian jenazah   | 150,000        |
| 2   | Pengafanan jenazah  | 150,000        |
| 3   | Paket kafan jenazah                                       | 300,000        |
| 4   | Pengawetan/ formalin                                      | 1,000,000      |
| 5   | Penitipan jenazah/ hari                                   | 50,000         |
| 6   | Penyimpanan dengan pendingin / hari                       | 100,000        |
| 7   | Peti jenazah  | 1,500,000      |
| Pembenahan luka jenazah   |   |                |
| 1   | Ringan ≤ 20 Jahitan                                       | 200,000        |
| 2   | Sedang 21 s.d 50 Jahitan                                  | 350,000        |
| 3   | Berat 51 s.d 100 jahitan                                  | 450,000        |
| 4   | Khusus (berantakan) > 100 jahitan                         | 500,000        |
| B. Pelayanan Medik Hukum  |   |                |
| 1   | Visum Et Repertum (VER)                                   | 150,000        |

Ambulans

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | Tarif Pemakaian ambulans dengan tujuan > 10 km | 350,000 |
| 2 | Jasa Sopir < 200 km                            | 100,000 |
|   | > 200 km                                       | 200,000 |
| 3 | Pendamping para medis < 200 km                 | 125,000 |
|   | > 200 km                                       | 250,000 |
| 4 | Pendamping Dokter < 200 km                     | 150,000 |
|   | > 200 km                                       | 300,000 |
| 5 | Tarif Ambulance Resque < 10 km                 |         |
|   | Termasuk Jasa Perawat (1 Orang) & Helper       | 200,000 |

2) LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

| No | JENIS PELAYANAN   | TARIF (Maksimal)                  |
|----|---|-----------------------------------|
| A  | Rawat Jalan   | Rp. 20.000                        |
| B  | Rawa Inap (perhari)   | Rp. 200.000                       |
| C  | Persalinan PONED  | Rp. 650.000 - Rp. 950.000         |
| D  | Pemeriksaan kesehatan dan / atau Pengobatan umum                      | Rp.20.000 -Rp. 255.000            |
| E  | Pelayanan Tindakan Medis  |                                   |
| 1  | Tindakan kesehatan umum (Rawat jalan, Rawat Inap, UGD)                | Rp. 5.000 - Rp. 200.000           |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                      | Rp. 10.000 - Rp. 300.000          |
| 3  | Pelayanan Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut                           | Rp. 25.000 - Rp. 150.000          |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Lain-lain   | Rp. 10.000 - Rp. 900.000          |
| 5  | Penggunaan Ambulan Puskesmas dan Pendamping                           | Rp. 100.000 - Rp. 150.000         |
| 6  | Pemakaian Oksigen / Tabung  | Rp. 75.000 - Rp. 100.000          |
| F  | Pelayanan Penunjang Diagnostik  | Rp. 8.000 - Rp. 150.000           |
| G  | Pelayanan Farmasi   | Maksimal 20% dari harga perolehan |
| H  | Pelayanan Penunjang Medis Lainnya (Pelayanan P3K pada event per hari) | Rp. 75.000 - Rp. 250.000          |
| I  | Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer                            | Rp. 50.000                        |



## 2. PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1) Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah

| No. | RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN   | BESARNYA TARIF RETRIBUSI                        |
|-----|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| 1.  | Pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga (rumah tinggal), los/hamparan/kios                                      | Rp 10.000/bln                                   |
| 2.  | Pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah untuk:<br>- Toko<br>- Pasar Modern   | Rp 30.000/bln<br>Rp 100.000/bln                 |
| 3.  | Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk industri<br>- Tempat Pelelangan Ikan<br>- Perusahaan/Industri                   | Rp 200.000/bln<br>Rp. 300.000/Ritasi            |
| 4.  | Pengangkuta, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk rumah makan:<br>- Kecil<br>- Menengah<br>- Besar                                 | Rp 30.000/bln<br>Rp 45.000/bln<br>Rp 60.000/bln |
| 5.  | Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk rumah sakit swasta dan atau fasilitas pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit | Rp 200.000/Ritasi                               |
| 6.  | Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk klinik, balai pengobatan dan atau sejenisnya                                    | Rp 50.000/bln                                   |
| 7.  | Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk kantor dan sejenisnya   | Rp 75.000/bln                                   |
| 8.  | Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk bengkel/tempat pencucian motor/tempat pencucian mobil atau sejenisnya           | Rp 50.000/bln                                   |
| 9.  | Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)   | Rp 150.000/sekali pembuangan                    |

### 2) Penyedotan Kakus

| NO | RETRIBUSI PELAYANAN SEDOT KAKUS   | BESARNYA TARIF RETRIBUSI   |
|----|---|--|
| 1. | WC klasifikasi A yaitu WC yang berfungsi sosial seperti WC rumah ibadah, rumah yatim piatu, dan sejenisnya  | Tidak dikenakan biaya sesuai dengan PP 35 Tahun 2013 Pasal 29 ayat 1 dan 2 |
| 2. | WC klasifikasi B yaitu WC rumah tinggal atau tempat tinggal   | Rp 150.000/M <sup>3</sup>  |
| 3. | WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti WC Terminal Angkutan, Sekolah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama dan sejenisnya  | Rp 250.000/M <sup>3</sup>  |
| 4. | WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan pada bangunan yang bersifat komersial seperti hotel, penginapan, kantor perusahaan, Minimarket, toko-toko, Pusat pertokoan supermarket, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, pabrik dan lain -lain | Rp 350.000/M <sup>3</sup>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 5. | Klasifikasi B,C dan D Apabila dalam Penyedotan Kakus menggunakan selang lebih dari 20 meter maka dikenakan tambahan biaya penggunaan selang sebesar Rp.5.000,-/Meter |  |
|----|--|--|

3) Pengolahan Sampah Medis

|        |        |
|--------|--------|
| Uraian | Jumlah |
| 1 kg   | 35,400 |

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| NO. | JENIS PELAYANAN   | SATUAN        | TARIF     | KETERANGAN |
|-----|---|---------------|-----------|------------|
| 1   | Kendaraan Roda Dua  | Sekali parkir | Rp. 2.000 | Per kali   |
| 2   | Kendaraan Roda Tiga   | Sekali parkir | Rp 2.000  | Per kali   |
| 3   | Kendaraan Roda Empat ) seperti : Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up, dan sejenisnya | Sekali parkir | Rp 3.000  | Per kali   |
| 4   | Kendaraan angkutan barang, seperti : mobil box dan sejenisnya, Bus kecil, bus   | Sekali parkir | Rp. 3.000 | Per kali   |
| 5   | Kendaraan bus besar   | Sekali parkir | Rp. 5.000 | Per kali   |
| 6   | Kendaraan truck gandeng, truck tempelan, trailer, dan sejenisnya                | Sekali parkir | Rp. 5.000 | Per kali   |

3. PELAYANAN PASAR

| NO | JENIS PELAYANAN | SATUAN   | TARIF     |
|----|-----------------|----------|-----------|
| 1. | Los             |          |           |
|    | 1. Los Terbuka  | Per Hari | Rp. 5.000 |
|    | 2. Los Tertutup | Per Hari | Rp. 6.000 |
| 2. | Hamparan        | Per Hari | Rp. 3.000 |

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN KEGIATAN USAHA LAINNYA

| No | Jenis | Satuan                | Besar Tarif Baru |
|----|-------|-----------------------|------------------|
| 1. | Toko  | M <sup>2</sup> /Bulan | Rp 20.000        |
| 2. | Ruko  | M <sup>2</sup> /Bulan | Rp 30.000        |

Sewa Gedung/Bangunan Tempat Wisata Air Terjun Way Lalaan

| No | Jenis Layanan                         | Satuan      | Tarif (Rp)    |
|----|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Kios Kuliner di Air Terjun Way lalaan | Per Bulan   | Rp 100.000    |
|    |                                       | Per Tahunan | Rp. 1.000.000 |

Sewa Gedung/Bangunan Sentra Kuliner Taman Wisata Muara Indah

| No | Jenis Layanan | Satuan    | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|---------------|-----------|------------|------------|
| 1. | Kios          | Per Bulan | 100.000    |            |

Sewa Gedung/Bangunan Sentra UMKM

| No. | Jenis Layanan | Besaran Tarif | Besaran Tarif     |
|-----|---------------|---------------|-------------------|
| 1.  | Kios          | hari          | Rp 5.000,-/hari   |
|     |               | bulan         | Rp 50.000,-/bulan |
| 2.  | Hampanan      | hari          | Rp 5.000,-/hari   |

Terminal Agribisnis (STA) Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting 6

| No. | Jenis Layanan | Satuan                  | Tarif (Rp) |
|-----|---------------|-------------------------|------------|
| 1.  | Hampanan      | 1. Per Hari / Hampanan  | 2.500      |
|     |               | 2. Per Bulan / Hampanan | 75.000     |
|     |               | 3. Per Tahun / Hampanan | 900.000    |

Terminal Agribisnis (STA) Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting 17

| No | Jenis Layanan | Satuan             | Tarif (Rp) |
|----|---------------|--------------------|------------|
| 1. | Kios          | 1. Per Hari / Kios | 4.000      |
|    |               | 2. Per Bulan /Kios | 120.000    |
|    |               | 3. Per Tahun /Kios | 1.440.000  |

2. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

| Jenis Layanan          | Tarif                           | Keterangan  |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Tempat Pelelangan Ikan | Rp.20.000/m <sup>2</sup> /Bulan | Dibebankan kepada nelayan berdasarkan penyewaan tempat pelelangan ikan yang dihitung berdasarkan luas dan durasi waktu penyewaan. |

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

| No | Jenis Pelayanan  | Satuan        | Tarif      | Tarif Tambahan PerJam  |
|----|--|---------------|------------|--|
| 1. | Bus, truck, dan sejenisnya   | Sekali parkir | Rp. 4.000  | 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000/jam, maksimal 14.000 untuk sekali parkir   |
| 2. | Kendaraan roda 4 (empat)   | Sekali parkir | Rp 3.000   | 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500 /jam, maksimal 10.000 untuk sekali parkir. |
| 3. | Kendaraan motor roda 3 atau roda 2   | Sekali parkir | Rp 2.000   | 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000 /jam, maksimal 7.000 untuk sekali parkir   |
| 4. | Jasa Valet Parkir  | Sekali parkir | Rp. 10.000 |  |
| 5. | Retribusi Masuk Kendaraan Roda 2 (dua) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur   | Per- unit     | 5.000      |  |
| 6. | Retribusi Masuk Kendaraan Roda 3 (tiga) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur  | Per- unit     | 7.500      |  |
| 7. | Retribusi Masuk Kendaraan Roda 4 (empat) Ke Objek wisata airterjun way lalaan kota Agung Timur | Per- unit     | 15.000     |  |

|    |  |           |        |  |
|----|--|-----------|--------|--|
| 8. | Retribusi Masuk Kendaraan Roda 6 (enam) Ke Objek wisata air terjun way lalaan kota Agung Timur | Per- unit | 25.000 |  |
|----|--|-----------|--------|--|

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA  
Mess Pemda

| No. | Jenis Layanan                                 | Satuan              | Tarif (Rp) |
|-----|---|---------------------|------------|
| 1.  | Umum  | Per Hari / Kamar    | 75.000     |
| 2.  | Sewa Bulanan Mess ASN/Non ASN Pemda Tanggamus | 1. Per Hari / Kamar | 50.000     |
|     |   | 2. Per Bulan/Kamar  | 500.000    |

5. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Layanan Objek Wisata dan Wahana Rekreasi

| No | Nama dan Lokasi/Penarikan Retribusi  | Satuan    | Tarif (Rp) |
|----|--|-----------|------------|
| 1  | Retribusi Masuk Wisatawan ke Objek wisata Taman Taman wisata muara indah kota Agung          | Per-orang | 5.000      |
| 2  | Retribusi Masuk Wisatawan Domestik ke Objek Wisata air terjun way lalaan kota Agung Timur    | Per-orang | 10.000     |
| 3  | Retribusi Masuk Wisatawan Mancanegara ke Objek wisata air terjun way lalaan kota agung timur | Per-orang | 25.000     |
| 4  | Retribusi Masuk Tempat Rekreasi Kolam Renang   | Per-orang | 20.000     |

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Sewa Gedung di RSUD Batin Mangunang

| Jenis Layanan | Tarif   |
|---------------|---------|
| Sewa Gedung   | 265,500 |

2) Penyewaan container sampah atau truk sampah

| No | Retribusi Pelayanan Kebersihan  | Besarnya Tarif Retribusi |
|----|---|--------------------------|
| 1  | Penyewaan container sampah atau truk sampah (sewa diluar biaya operasional) | Rp 100.000/sekali jalan  |

3) Sewa Gedung di Tempat Wisata Air Terjun Way Lalaan

| No | Jenis   | Satuan   | Tarif (Rp) |
|----|---|----------|------------|
| 1  | Panggung Kesenian/<br>Pertunjukan Air Terjun Way Lalaan | Per-hari | 500.000    |
| 2  | Panggung Kesenian/ Pertunjukan Air<br>Terjun Way Lalaan | Per-hari | 300.000    |

4) Gedung Islamic Center (Pusdai), Berserta Fasilitasnya

| No | Jenis Layanan        | Satuan           | Tarif (Rp) |
|----|----------------------|------------------|------------|
| 1. | Aula Utama Non AC    | Per Hari         | 200.000    |
| 2. | Aula Utama AC        | Per Hari         | 550.000    |
| 3. | Aula Pertemuan I-III | Per Hari         | 100.000    |
| 4. | Asrama 1 dan 2 :     |                  |            |
|    | 1. AC                | Per Hari / Kamar | 100.000    |
|    | 2. Non AC            | Per Hari/ Kamar  | 75.000     |
| 5. | Lapangan Masjid      | Per Hari         | 100.000    |
| 6. | Lapangan Asrama      | Per Hari         | 75.000     |
| 7. | Sound System         | Per Hari         | 500.000    |
| 8. | Kursi                | Per Hari / Kursi | 1.000      |

5) Besaran Tarif Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Ratu

| No. | Jenis Kegiatan                     | Besaran Tarif                 | Keterangan   |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.  | Pemanfaatan Gelanggang<br>Olahraga | Rp 200.000,-/<br>Per Kegiatan | Pelaksanaan kegiatan<br>paling lama 1 (satu)<br>hari |
| 2.  | Pemanfaatan Gelanggang<br>Olahraga | Rp 2.000.000,-<br>/ Per Hari  | Selain kegiatan di<br>bidang olahraga                |

6) Lahan Sawah Tadah Hujan Pekon Kali Bening Kecamatan Talang Padang

| No | Jenis Layanan    | Satuan         | Tarif (Rp) |
|----|------------------|----------------|------------|
| 1. | Sewa Lahan Sawah | Per Tahun / Ha | 3.000.000  |

7) Lahan Kolam UPTD Perikanan Air Tawar di Kecamatan Pugung

| No | Jenis Layanan    | Satuan    | Tarif (Rp) |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Sewa Lahan Kolam | Per Tahun | 3.500.000  |

8) Sewa Gedung/Bangunan Sentra Kuliner Taman Wisata Muara Indah

| No | Jenis Layanan | Satuan       | Tarif (Rp) |
|----|---------------|--------------|------------|
| 1. | Aula Utama    | Per Kegiatan | 400.000    |

9) Excavator kapasitas 13 ton untuk pembuatan kolam/tambak/irigasi/normalisasi/bagi kelompok pembudidayaan ikan/koperasi

| No | Jenis Layanan    | Satuan   | Tarif (Rp) |
|----|------------------|----------|------------|
| 1. | Sewa Lahan Kolam | Per Hari | 300.000    |

10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sistem Resi Gudang (SRG)

| No | Retribusi Pelayanan Kebersihan  | Besaran Tarif          | Keterangan  |
|----|---------------------------------|------------------------|---|
| 1. | Gudang SRG (Sistem Resi Gudang) | Rp 45.000.000,- /Tahun | Retribusi dikenakan bagi pelaku Usaha yang memanfaatkan Gudang SRG (Sistem Resi Gudang) |

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI DAN BIAYA PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG

| KOMPONEN RETRIBUSI                                  | PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI   |
|---|---|
| Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung |   |
| Bangunan Gedung Pembangunan Bangunan Gedung         | $L \text{ Lt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$<br>Luas Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun |
| Prasarana Bangunan Gedung                           | $V \times I \times I \text{ pbg} \times H \text{ Spbg}$<br>Volumex Indeks Bangunan Gedung Terbangun x Indeks Prasarana Bangunan Gedung x Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung   |

CATATAN :

1. Indeks Terintegasi :

Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan Indeks Parameter x Faktor Kepemilikan Bangunan Gedung, atau dengan rumus :  $I_f \times S \text{ (bp} \times \text{Ip)} \times F_m$

2. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kab. Tanggamus, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.240.000
2. bangunan sederhana sebesar Rp 5.410.000

2. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks Kegiatan

1. Bangunan Gedung

a. Pembangunan Gedung Baru : 1,00

b. Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak Sedang :  $0,45 \times 50\% = 0,225$

2) Rusak Berat :  $0,65 \times 50\% = 0,325$

c. Pelestarian/Pemugaran

1) Pratama :  $0,65 \times 50\% = 0,325$

2) Madya :  $0,45 \times 50\% = 0,225$

3) Utama :  $0,30 \times 50\% = 0,150$



2. Prasarana Bangunan Gedung
  - a. Pembangunan Baru : 1,00
  - b. Rehabilitasi/renovasi
    - 1) Rusak Sedang :  $0,45 \times 50\% = 0,225$
    - 2) Rusak Berat :  $0,65 \times 50\% = 0,325$

## B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung Diatas Permukaan Tanah
  - a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
    - 1) Fungsi Hutan :
      - Indeks fungsi hunian  $<100 \text{ m}^2$  dan  $<2$  lantai : 0,15
      - Indeks fungsi hunian  $>100 \text{ m}^2$  dan  $>2$  lantai : 0,17
    - 2) Fungsi Keagamaan : 0
    - 3) Fungsi Usaha : 0,7
    - 4) Fungsi Usaha UMKM : 0,5
    - 5) Fungsi Sosial Budaya : 0,3
    - 6) Fungsi Khusus : 1
    - 7) Fungsi Ganda/Campuran :
      - Indeks fungsi campuran dengan luas  $<500 \text{ m}^2$  dan  $<2$  lantai : 0,6
      - Indeks fungsi campuran dengan luas  $>500 \text{ m}^2$  dan  $>2$  lantai : 0,8
  - b. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
    - 1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologidengan bobot 0,30 :
      - Sederhana : 1
      - Tidak Sederhana : 2
    - 2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20
      - Non Permanen : 1
      - Permanen : 2
    - 3) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,5 dan mengikuti tabel koefisien jumlah lantai.
    - 4) Kepemilikan bangunan gedung :
      - Perorangan/Badan Usaha : 1
      - Negara : 2

## 2. Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung terdiri dari indeks pembangunan baru, indeks rusak sedang dan indeks rusak berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

- C. Indeks Lokalitas : ditetapkan Pemerintah Daerah sebesar 0,50% (nol koma limapersen) atau ditetapkan sebagai berikut:

| Fungsi Bangunan | Keterangan       | Indeks Lokalitas |                |                 |                  |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                 |                  | Jalan Nasional   | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten | Jalan Lingkungan |
| Hunian          | Sederhana        | 0,5              | 0,5            | 0,5             | 0,4              |
|                 | Tidak Sederhana  | 0,5              | 0,5            | 0,5             | 0,4              |
| Usaha           | Mikro            | 0,4              | 0,4            | 0,4             | 0,3              |
|                 | Non Mikro        | 0,5              | 0,5            | 0,5             | 0,5              |
| Sosial Budaya   | PAUD s/d         | 0,1              | 0,1            | 0,1             | 0,1              |
|                 | Perguruan Tinggi | 0,2              | 0,2            | 0,2             | 0,2              |
| Sosial Budaya   |                  | 0,3              | 0,3            | 0,3             | 0,3              |
| Khusus          |                  | 0,5              | 0,5            | 0,5             | 0,5              |

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTREGASI PENGHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

| Fungsi                                    | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi                 | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter                           |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|
| Usaha                                     | 0,7                | Kompleksitas                | 0,3                  | Sederhana<br>Tidak Sederhana               | 1<br>2                                     |
| Usaha (UMKM Prototipe)                    | 0,5                | Permanensi                  | 0,2                  | Non Permanen<br>Permanen                   | 1<br>2                                     |
| Hunian                                    |                    | Ketinggian                  | 0,5                  | *) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai | *) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai |
| a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai      | 0,15               |                             |                      |  |  |
| b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai      | 0,17               |                             |                      |  |  |
| Keagamaan                                 | 0                  |                             |                      |  |  |
| Fungsi Khusus                             | 1                  |                             |                      |  |  |
| Sosial Budaya                             | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm)     |                      |  |  |
| Ganda/Campuran                            |                    | a. Negara                   |                      |  |  |
| a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai | 0,6                | b. Perorangan/Badan Usaha 1 |                      |  |  |
| b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai | 0,8                |                             |                      |  |  |

III. TABEL PENETAPAN KOEFISIEN JUMLAH LANTAI RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

| Jumlah Lantai         | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 19            | 1,541                   | 41            | 1,768                   |
| Basemen 3 lapis       | 1,393                   | 20            | 1,556                   | 42            | 1,775                   |
| Basemen 2 lapis       | 1,299                   | 21            | 1,570                   | 43            | 1,782                   |
| Basemen 1 lapis       | 1,197                   | 22            | 1,584                   | 44            | 1,789                   |
| 1                     | 1                       | 23            | 1,597                   | 45            | 1,795                   |
| 2                     | 1,090                   | 24            | 1,610                   | 46            | 1,801                   |
| 3                     | 1,120                   | 25            | 1,622                   | 47            | 1,807                   |
| 4                     | 1,135                   | 26            | 1,634                   | 48            | 1,813                   |
| 5                     | 1,162                   | 27            | 1,645                   | 49            | 1,818                   |
| 6                     | 1,197                   | 28            | 1,656                   | 50            | 1,823                   |
| 7                     | 1,236                   | 29            | 1,666                   | 51            | 1,828                   |
| 8                     | 1,265                   | 30            | 1,676                   | 52            | 1,833                   |
| 9                     | 1,299                   | 31            | 1,686                   | 53            | 1,837                   |
| 10                    | 1,333                   | 32            | 1,695                   | 54            | 1,841                   |
| 11                    | 1,364                   | 33            | 1,704                   | 55            | 1,845                   |
| 12                    | 1,393                   | 34            | 1,713                   | 56            | 1,849                   |
| 13                    | 1,420                   | 35            | 1,722                   | 57            | 1,853                   |
| 14                    | 1,445                   | 36            | 1,730                   | 58            | 1,856                   |
| 15                    | 1,468                   | 37            | 1,738                   | 59            | 1,859                   |
| 16                    | 1,489                   | 38            | 1,746                   | 60            | 1,862                   |
| 17                    | 1,508                   | 39            | 1,754                   | 60 + n        | 1,862 + 0,003 (n)       |
| 18                    | 1,525                   | 40            | 1,761                   |               |                         |

Keterangan :

- a. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;

- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah ;antai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- d. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- e. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB)) (\sum LLi + \sum LBi)}{\sum LBi}$$

Lli : Luas lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah  
 lantai  
 Lbi : Luas  
 Basemne ke-1  
 Kbi: Koefisien jumlah lapis

IV. TABEL INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

| NO. | JENIS PRASARANA   | Bangunan                    | Satuan         | Pembangunan Baru | Rusak Berat/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 65%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung | Rusak Sedang/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 45%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung |
|-----|---|-----------------------------|----------------|------------------|--|---|
|     |   |                             |                | indeks           | indeks   | indeks  |
| 1   | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman                        | Pagar                       | m              | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Tanggul/retaining wall      | m              | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Turap batas kaveling/persil | m              | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 2   | Konstruksi penanda masuk lokasi                             | Gapura                      | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Gerbang                     | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 3   | Konstruksi perkerasan                                       | Jalan                       | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Lapangan upacara            | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Lapangan olahraga terbuka   | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 4   | Konstruksi perkerasan aspal beton                           |                             | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 5   | Konstruksi perkerasan grassblock                            |                             | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 6   | Konstruksi penghubung                                       | Jembatan                    | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Box Culverts                | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 7   | Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)               |                             | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 8   | Konstruksi penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang) |                             | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 9   | Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)      |                             | m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |

|     |   |   |   |                  |  |   |
|-----|---|---|---|------------------|--|---|
| 10  | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah | Kolam renang                                  | m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 11  | Konstruksi septictank, sumur Resapan    |   | m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| NO. | JENIS PRASARANA                         | Bangunan                                      | Satuan  | Pembangunan Baru | Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung | Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung |
|     |   |   |   | indeks           | indeks   | indeks  |
| 12  | Konstruksi Menara                       | Menara reservoir                              | Per 5 m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Cerobong                                      | Per 5 m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 13  | Konstruksi menara air                   |   | Per 5 m <sup>2</sup>  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 14  | Konstruksi monumen                      | Tugu  | Unit  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Patung  | Unit  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Di dalam persil                               | Unit  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Di laur persil                                | Unit  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 15  | Konstruksi instalasi/ gardu listrik     | Instalasi listrik                             | Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> ) | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |   | Instalasi telepon/ komunikasi                 | Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |

| NO. | JENIS PRASARANA                     | Bangunan   | Satuan   | Pembangunan Baru | Rusak Berat/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 65%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung | Rusak Sedang/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 45%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung |
|-----|-------------------------------------|--|--|------------------|--|---|
|     |                                     |  |  |                  | indeks   | indeks  |
|     |                                     |  | m <sup>2</sup><br>dikenakan<br>biaya<br>tambahan<br>per m <sup>2</sup>   |                  |  |   |
|     |                                     | Instalasi<br>pengolahan  | Unit (luas<br>maksimum<br>10 m <sup>2</sup> ,<br>apabila unit<br>lebih dari 10<br>m <sup>2</sup><br>dikenakan<br>biaya<br>tambahan<br>per m <sup>2</sup> | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 16  | Konstruksi<br>reklame/papan nama    | Billboard papan iklan  | Unit dan<br>penambah<br>annya  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |                                     | Papan nama<br>(berdiri sendiri atau<br>berupa<br>tembok pagar) | Unit dan<br>penambah<br>annya  | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 17  | Fondasi mesin (di luar<br>bangunan) |  | Unit mesin   | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| 18  | Konstruksi menara<br>televisi       |  | Unit (tinggi<br>maksimal<br>100m,<br>selebihnya<br>dihitung<br>kelipatannya)   | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |



|     |  |                               |        |                  |  |   |
|-----|--|-------------------------------|--------|------------------|--|---|
| 19  | Konstruksi antena radio                      |                               |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     | 1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki |                               |        |                  |  |   |
|     |  | Ketinggian 25-50 m            |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 51-75 m            |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 76-100 m           |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 101-125 m          |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 126-150 m          |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian di atas 150m       |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 0-50 m             |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 51-75 m            |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 76-100 m           |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian di atas 100m       |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     | 2. Sistem guy wire/bentang kawat             | Ketinggian 0-50 m             |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 51-75 m            |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian 76-100 m           |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | Ketinggian di atas 100m       |        | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
| NO. | JENIS PRASARANA                              | Bangunan                      | Satuan | Pembangunan Baru | Rusak Berat/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 65%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung | Rusak Sedang/<br>Pekerjaan<br>Konstruksi<br>Sebesar 45%<br>Dari<br>Bangunan<br>Gedung |
|     |  |                               |        | indeks           | indeks   | indeks  |
| 20. | Konstruksi antena (tower telekomunikasi)     |                               |        |                  |  |   |
|     |  | Menara Bersama                |        |                  |  |   |
|     |  | a. ketinggian kurang dari 25m | Unit   | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | b. ketinggian 25-50m          | Unit   | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |
|     |  | c. ketinggian di atas         | Unit   | 1,00             | 0,65 x 50%   | 0,45 x 50%  |

|    |                                   |                               |                |      |            |            |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|------------|
|    |                                   | 50m                           |                |      |            |            |
|    |                                   | Menara Mandiri                |                |      |            |            |
|    |                                   | a. ketinggian kurang dari 25m | Unit           | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
|    |                                   | b. ketinggian 25-50m          | Unit           | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
|    |                                   | c. ketinggian di atas 50m     | Unit           | 1,00 | 0,65 x 50% | 0,45 x 50% |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar          |                               | Unit           |      |            |            |
| 22 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | Saluran                       | m              |      |            |            |
|    |                                   | Kolam Tampung                 | m <sup>2</sup> |      |            |            |
| 23 | Konstruksi penyimpanan/silo       |                               | m <sup>2</sup> |      |            |            |

Keterangan :

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

V. TABEL STRUKTUR DAN BESARAN HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

| NO. | JENIS BANGUNAN/ PRASARANA                                   | SATUAN         | BANGUNAN                      | HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)  |
|-----|---|----------------|-------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3              | 4                             | 5  |
| A.  | Bangunan Gedung   | m <sup>2</sup> |                               | Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah |
| B.  | Prasarana Bangunan Gedung                                   |                |                               |  |
| 1   | Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman                      | m <sup>2</sup> | a. Pagar                      | 3.000,00   |
|     |   |                | b. Tanggul/retaining wall     | 6.000,00   |
|     |   |                | c. Turap batas kavling/persil | 5.000,00   |
| 2   | Konstruksi penanda masuk lokasi                             | m <sup>2</sup> | a. Gapura                     | 150.000,00   |
|     |   |                | b. Gerbang                    | 250.000,00   |
| 3   | Konstruksi perkerasan                                       | m <sup>2</sup> | a. jalan/parkir/comb lock     | 5.000,00   |
|     |   |                | b. lapangan upacara           | 8.000,00   |
|     |   |                | c. lapangan olahraga terbuka  | 8.000,00   |
| 4   | Konstruksi perkerasan aspal, beton                          | m <sup>2</sup> |                               | 8.000,00   |
| 5   | Konstruksi perkerasan grassblock                            | m <sup>2</sup> |                               | 5.000,00   |
| 6   | Konstruksi penghubung                                       | m <sup>2</sup> | a. Jembatan                   | 20.000,00  |
|     |   |                | b. Boxculvert/ gorong-gorong  | 20.000,00  |
| 7   | Konstruksi penghubung (jembatan antargedung)                | m <sup>2</sup> |                               | 50.000,00  |
| 8   | Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang) | m <sup>2</sup> |                               | 250.000,00   |
| NO. | JENIS BANGUNAN/ PRASARANA                                   | SATUAN         | BANGUNAN                      | HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.)  |
| 1   | 2   | 3              | 4                             | 5  |

|    |  |  |  |              |
|----|--|--|--|--------------|
| 9  | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass) | m <sup>2</sup>   |  | 140.000,00   |
| 10 | Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah                 | m <sup>2</sup>   | a. Kolam renang private                          | 30.000,00    |
|    |  |  | b. Kolam renang komersil                         | 150.000,00   |
|    |  |  | c. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah | 30.000,00    |
| 11 | Konstruksi septictank, sumur resapan                   |  |  | 15.000,00    |
| 12 | Konstruksi menara                                      | Per m <sup>2</sup>   | a. Menara reservoir                              | 400.000,00   |
|    |  |  | b. Cerobong                                      | 500.000,00   |
| 13 | Konstruksi menara air                                  | Per m <sup>2</sup>   |  | 8.000,00     |
| 14 | Konstruksi monumen                                     | Unit   | a. Tugu  | 50.000,00    |
|    |  |  | b. Patung  | 50.000,00    |
|    |  |  | c. Di dalam persil                               | 500.000,00   |
|    |  |  | d. Di luar persil                                | 250.000,00   |
| 15 | Konstruksi instalasi, gardu listrik                    | Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,00 per m <sup>2</sup> ) | a. Instalasi Listrik                             | 2.500.000,00 |
|    |  |  | b. Instalasi telepon/komunikasi                  | 2.500.000,00 |
|    |  |  | c. Instalasi Pengolahan                          | 500.000,00   |
| 16 | Konstruksi reklame/papan nama                          | Unit dan penambahan Luasan ≤6  | a. Billboard/papan iklan (bersifat komersil)     | 1.500.000,00 |

|     |                                     | m <sup>2</sup> ,<br>apabila unit<br>lebih<br>dari 6 m <sup>2</sup><br>dikenakan<br>biaya<br>tambahan<br>Rp<br>250.000 per<br>6m <sup>2</sup>  |  |   |
|-----|-------------------------------------|---|--|---|
| NO. | JENIS<br>BANGUNAN/<br>PRASARANA     | SATUAN  | BANGUNAN   | HARGA SATUAN<br>BANGUNAN DAN<br>PRASARANA (Rp.) |
| 1   | 2                                   | 3   | 4  | 5   |
|     |                                     | Unit (semua<br>besaran)   | b. Papan nama  | Tidak dikenakan<br>Retribusi (Rp.0)             |
|     |                                     | Unit dan<br>penambahannya<br>Luasan ≤20<br>m <sup>2</sup> , apabila<br>unit lebih<br>dari 20 m <sup>2</sup><br>dikenakan<br>biaya<br>tambahan<br>Rp<br>250.000 per<br>6m <sup>2</sup> | c.<br>Videotron/megatron<br>(berdiri<br>sendiri)       | 5.000.000,00                                    |
| 17  | Konstruksi<br>fondasi mesin         | Unit mesin  | Fondasi mesin  | 550.000,00                                      |
| 18  | Konstruksi<br>Menara Televisi       | Unit (tinggi<br>maksimal<br>100m)<br>selebihnya<br>dihitung<br>kelipatan<br>per m <sup>2</sup><br>dikenakan<br>biaya<br>tambahan<br>Rp<br>2.500.000,00                                |  | 250.000.000,00                                  |
| 19  | Konstruksi<br>Antena Radio          |   | 1) Standing tower<br>dengan<br>konstruksi 3-<br>4 kaki |   |
|     |                                     | Unit  | Ketinggian 25-50 m                                     | 6.000.000,00                                    |
|     |                                     |   | Ketinggian 51-75 m                                     | 8.000.000,00                                    |
|     |                                     |   | Ketinggian 76-100<br>m                                 | 10.000.000,00                                   |
|     |                                     |   | Ketinggian 101-125<br>m                                | 12.500.000,00                                   |
|     |                                     |   | Ketinggian 126-150<br>m                                | 15.000.000,00                                   |
|     |                                     |   | Ketinggian di atas<br>150m                             | 20.500.000,00                                   |
|     | 2) Sistem guywire/<br>bentang kawat |   |  |   |

|     |  |                |                            |   |
|-----|--|----------------|----------------------------|---|
|     |  | Unit           | Ketinggian 25-50 m         | 3.000.000,00                              |
|     |  |                | Ketinggian 51-75 m         | 4.500.000,00                              |
|     |  |                | Ketinggian 76-100 m        | 6.000.000,00                              |
|     |  |                | Ketinggian di atas 100m    | 10.000.000,00                             |
| 20. | Konstruksi antena (tower telekomunikasi) |                | Menara Bersama             |   |
|     |  | Unit           | Ketinggian kurang dari 25m | 75.000.000,00                             |
|     |  |                | Ketinggian 25-50m          | 150.000.000,00                            |
|     |  |                | Ketinggian di atas 50m     | 175.000.000,00                            |
|     |  |                | Menara Mandiri             |   |
|     |  |                | Ketinggian kurang dari 25m |   |
|     |  | Unit           | Ketinggian 25-50m          | 35.000.000,00                             |
|     |  |                | Ketinggian di atas 50m     | 75.000.000,00                             |
| NO. | JENIS BANGUNAN/ PRASARANA                | SATUAN         | BANGUNAN                   | HARGA SATUAN BANGUNAN DAN PRASARANA (Rp.) |
| 1   | 2  | 3              | 4                          | 5   |
| 21  | Tangki tanam bahan bakar                 | Unit           | 1) Tangki Timbun           | 25.000.000,00                             |
|     |  |                | 2) Instalasi bahan bakar   | 15.000.000,00                             |
| 22  | Pekerjaan drainase (dalam persil)        | m <sup>2</sup> | 1) Saluran air             | 2.500,00                                  |
|     |  | m <sup>2</sup> | 2) Kolam tampung           | 5.000,00                                  |
| 23  | Konstruksi penyimpanan/silo              | m <sup>2</sup> |                            | 100.000,00                                |

Catatan:

Konstruksi antena (tower telekomunikasi): Ketinggian tower dihitung dari atas permukaan tanah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| No. | Jenia Layanan                 | Satuan                  | Tarif    |
|-----|-------------------------------|-------------------------|----------|
| 1.  | Penggunaan Tenaga Kerja Asing | Per jabatan/orang/bulan | US\$ 100 |

Keterangan: Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

dto

MULYADI IRSAN